

Jaringan Sosial Antar Lembaga dalam Mendorong Pembentukan dan Pengembangan BUMDes di Desa Nanggerangjaya Kabupaten Kuningan: Pendekatan Teori Jaringan Sosial

Eka Raditya Fajar Saputra¹, Tutut Lusiasih², Muhammad Ramdani Iqra³

¹ Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon: ekaradityafajarsaputra@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon : tututlusiasih20@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon: muhammadramdani087@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received Jun 29, 2025

Revised Sep 23, 2025

Accepted Sep 28, 2025

Published Sep 28, 2025

Kata Kunci:

Jaringan Sosial, BUMDes,
Kolaborasi Kelembagaan, Teori
Jaringan Sosial.

Keywords:

*Social Networks, Village-Owned
Enterprises (BUMDes),
Institutional Collaboration, Social
Network Theory.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran jaringan sosial antar lembaga dalam mendorong proses pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Nanggerangjaya, Kabupaten Kuningan. Melalui pendekatan teori jaringan sosial, studi ini menyoroti bagaimana hubungan antar aktor seperti pemerintah desa, pengelola BUMDes, kelompok tani, lembaga keuangan, dan tokoh masyarakat membentuk struktur kolaboratif yang memengaruhi efektivitas kelembagaan desa. Data dikumpulkan melalui metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas dan kualitas relasi antar lembaga berdampak signifikan terhadap kemampuan BUMDes dalam mengakses sumber daya, membangun kepercayaan, dan mencapai keberlanjutan. Selain itu, posisi strategis dalam jaringan, seperti kemampuan menjadi penghubung antara institusi yang tidak terhubung langsung, menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas BUMDes. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kelembagaan desa tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga oleh dinamika sosial eksternal yang bersifat timbal balik dan berbasis kepercayaan.

ABSTRACT

This research discusses the role of inter-institutional social networks in promoting the formation and development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Nanggerangjaya Village, Kuningan Regency. Through a social network theory approach, this study highlights how relationships among actors such as village government, BUMDes managers, farmer groups, financial institutions, and community leaders create a collaborative structure that influences the effectiveness of village institutions. Data were collected using qualitative methods with techniques including interviews, observations, and document analysis. The results indicate that the intensity and quality of relationships among institutions significantly impact the ability of BUMDes to access resources, build trust, and achieve sustainability. Furthermore, a strategic position within the network, such as the ability to act as a bridge between institutions that are not directly connected, is an important factor in strengthening the capacity of BUMDes. This research emphasizes that the success of village institutions is not only determined by internal factors but also by external social dynamics that are reciprocal and trust-based.

Corresponding Author:

Name: Eka Raditya Fajar Saputra

Institution: Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: ekaradityafajarsaputra@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi pedesaan. BUMDes memiliki peranan kunci dalam mendorong pembangunan ekonomi di tingkat desa karena fungsinya sebagai wadah pengelolaan potensi lokal, peningkatan pendapatan asli desa, serta sarana pemberdayaan warga (Hasyim et al., 2021). Dalam kerangka pembangunan partisipatif, BUMDes berperan sebagai penghubung antara komunitas desa dan aparat pemerintah dalam mengelola sumber daya secara mandiri.

Namun, kesuksesan BUMDes tidak semata ditentukan oleh kapabilitas internal seperti manajemen keuangan atau produksi usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh relasi eksternal. Dukungan dari pemerintah desa, kemitraan dengan kelompok usaha masyarakat, akses ke permodalan, serta kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain merupakan faktor eksternal yang dapat memperkuat keberlanjutan dan inovasi BUMDes (Darma Saputra, 2021). Pola hubungan ini membentuk jaringan sosial yang mampu meningkatkan kapasitas adaptif dan memperkuat posisi BUMDes di tengah dinamika sosial ekonomi desa.

Sebagai bentuk penguatan kelembagaan, Kementrian Desa dan PDT telah mengelompokkan BUMDes ke dalam empat kategori, yaitu: dasar, berkembang, maju, dan mandiri (Panjaitan et al., 2022). Kriteria klasifikasi ini tidak hanya menitikberatkan pada output ekonomi, namun juga mempertimbangkan kualitas tata kelola, partisipasi warga, dan kekuatan jejaring sosial antar aktor desa. BUMDes yang memiliki kemitraan yang baik dan akses terhadap sumber daya eksternal cenderung lebih berkembang dibandingkan dengan yang berjalan secara tertutup dan tidak kolaboratif (Soejono et al., 2021), (Iskandar et al., 2021).

Namun demikian, kajian akademik yang secara khusus mengeksplorasi keterkaitan antara jaringan sosial antar lembaga dengan tingkat kemajuan BUMDes masih terbatas. Padahal, pemahaman terhadap pola interaksi antar aktor lokal sangat krusial untuk merumuskan strategi penguatan kelembagaan desa yang berbasis relasi sosial. Desa Nanggerangjaya di Kabupaten Kuningan menjadi salah satu contoh menarik karena sedang dalam proses pembentukan serta pengembangan BUMDes. Upaya ini melibatkan pemerintah desa, ketua BUMDes, anggota, lembaga kelompok tani, serta institusi pembiayaan. Namun, dinamika hubungan dan kontribusi dari masing-masing pihak terhadap perkembangan kelembagaan BUMDes masih belum terdokumentasi secara ilmiah.

Dalam teori jaringan sosial, aktor atau simpul (node) mengacu pada pihak-pihak, baik individu maupun institusi, yang berpartisipasi aktif dalam dinamika pembentukan dan perkembangan BUMDes. Di Desa Nanggerangjaya, sejumlah aktor strategis telah teridentifikasi, antara lain aparat pemerintah desa, pengelola BUMDes, kelompok tani, pendamping desa, lembaga keuangan, serta tokoh masyarakat lokal. Masing-masing pihak ini memainkan peran sebagai titik dalam jaringan yang saling terhubung melalui berbagai bentuk hubungan sosial. Hubungan tersebut tidak hanya menyangkut pertukaran informasi dan akses sumber daya, tetapi juga mencakup pemberian dukungan moral dan legitimasi sosial. Dengan memahami siapa saja yang terlibat serta posisi mereka dalam jaringan, dapat dianalisis bagaimana pola relasi tersebut mendukung atau menghambat pencapaian tujuan kelembagaan BUMDes.

Dalam praktiknya, jaringan sosial antar lembaga muncul dalam bentuk interaksi timbal balik secara formal maupun non-formal. Bentuknya bisa berupa koordinasi rutin, berbagi informasi

strategis, kerja sama dalam program pemberdayaan ekonomi, hingga bantuan nyata seperti pendanaan dan fasilitas. Relasi semacam ini menciptakan struktur sosial yang memperkuat kemampuan BUMDes dalam merenpons tantangan dan memaksimalkan potensi desa secara adaptif.

Oleh karena itu, teori jaringan sosial relevan digunakan untuk memahami dinamika hubungan yang memengaruhi keberhasilan BUMDes. Pendekatan ini menitikberatkan pada identifikasi aktor penting, pola hubungan antar mereka, serta bagaimana sumber daya dipertukarkan dalam jaringan tersebut. Melalui kajian atas jaringan sosial antar lembaga di tingkat lokal, penelitian ini berupaya menunjukkan sejauh mana pola relasi tersebut berdampak pada posisi dari perkembangan BUMDes sesuai klasifikasi yang ditetapkan.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis pola jaringan sosial antar lembaga yang terlibat dalam pembentukan dan pengembangan BUMDes di Desa Nanggerangjaya. Dengan menerapkan pendekatan teori jaringan sosial, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana struktur hubungan dan distribusi sumber daya antar aktor memengaruhi dalam pembentukan dan pengembangan BUMDes. Kajian ini juga bertujuan memberikan sumbangsih pemikiran bagi penguatan praktik kelembagaan desa melalui perspektif hubungan sosial yang lebih luas.

Teoritis dan Model Analisis

Dalam penelitian ini, pendekatan teori jaringan sosial yang dikemukakan oleh Ronald Burt dimanfaatkan untuk memahami bagaimana hubungan antar lembaga di tingkat lokal memengaruhi pembentukan dan perkembangan BUMDes. Teori ini menekankan bahwa interaksi sosial antarpelaku bukan hanya membentuk struktur hubungan, tetapi juga menjadi jalur penting dalam pertukaran sumber daya dan informasi yang menunjang keberhasilan kelembagaan (Ritzer, 2012:472).

Aktor-aktor seperti aparat desa, pengurus BUMDes, kelompok tani, lembaga pendanaan, pendamping desa, hingga tokoh masyarakat tidak bekerja secara terpisah. Mereka terhubung dalam sebuah jaringan sosial yang kompleks, di mana setiap pelaku memainkan peran strategis dalam mendukung proses kelembagaan BUMDes. Interaksi mereka berlangsung melalui bentuk-bentuk komunikasi formal seperti rapat koordinasi dan kemitraan, maupun informal seperti diskusi personal dan dukungan sosial.

Teori jaringan sosial membantu dalam menganalisis posisi strategis dari masing-masing aktor, pola keterhubungan yang terjadi, serta bentuk pertukaran yang dilakukan, baik berupa modal, legitimasi, informasi, maupun dukungan kolektif (Pranaya, 2023). Dengan memahami posisi dan relasi antar pelaku ini, peneliti dapat menilai bagaimana kekuatan jaringan tersebut memperkuat atau justru membatasi kapasitas kelembagaan BUMDes dalam merespons kebutuhan masyarakat dan dinamika lokal.

Untuk menggambarkan secara visual struktur relasi yang terbentuk, model analisis disusun dalam bentuk skema hubungan antar lembaga. Pemerintah desa, sebagai simpul utama, memainkan peran penting sebagai penghubung berbagai pihak. Namun, hubungan horizontal yang berkembang, misalnya antara kelompok tani dengan pengelola BUMDes, mencerminkan dinamika kolaboratif yang lebih partisipatif.

Melalui pemetaan jaringan sosial ini, penelitian dapat mengevaluasi bagaimana intensitas hubungan dan aliran sumber daya antar lembaga berdampak terhadap keberhasilan kelembagaan desa. Semakin kuat keterhubungan dan kepercayaan antarpelaku, maka semakin besar pula potensi keberlanjutan dan efektivitas BUMDes sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis lokal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini dinilai efektif untuk mengkaji secara mendalam relasi jaringan sosial anatar lembaga dalam konteks spesifik di Desa Nanggerangjaya. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara semi struktur, observasi langsung, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan kepada berbagai aktor seperti ketua BUMDES, pemerintah desa, pengelola BUMDes, tokoh masyarakat desa, serta masyarakat umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktor Kunci dalam Jaringan

Desa Nanggerangjaya merupakan desa yang terletak di Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan. Desa yang terletak di sekitar Gunung Ciremai, membuat terdapat hamparan sawah luas yang mengelilingi desa. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat di desa berprofesi sebagai petani, serta ada yang berprofesi sebagai peternak. Keberadaann BUMDes di Desa Nanggerangjaya pada saat ini adalah baru saja dibentuk, yang berfokus pada pengembangan BUMDes dalam sektor peternakan kambing.

Dalam proses pembentukan BUMDes Desa Nanggerangjaya, terdapat sejumlah pihak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan program tersebut. Pemerintah desa berperan sebagai pemangku kebijakan lokal yang mengarahkan visi dan struktur kelembagaan. Salah satu narasumber dari pemerintah desa menjelaskan:

“Pada awalnya pemerintah desa bersama BPD mengadakan acara Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dalam proses awal pembentukan BUMDes, yang pada akhirnya terbentuk mulai dari ketua (direktur BUMdes), sekretaris, dan bendahara.” (Pemdes, 23 Juni 2025).

Di sisi lain, pengelola BUMDes bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan operasional harian. Dukungan dari kelompok masyarakat seperti petani dan peternak, menjadi bagian penting dalam membangun kerja sama yang produktif. Selain itu pihak eksternal seperti pendamping desa, lembaga pembiayaan, serta aparat desa turut memberikan kontribusi melalui fasilitasi sumber daya dan pendamping teknis. Seluruh aktor tersebut membentuk jaringan sosial yang menjadi fondasi dalam memperkuat kinerja BUMDes (Putri et al., 2021).

Pola Interaksi

Reaksi antara BUMdes dengan berbagai aktor pendukung di Desa Nanggerngjaya menunjukkan pola interaksi yang bersifat kombinatif, yakni mencakup hubungan formal dan informal. Bentuk interaksi formal terlihat melalui kegiatan seperti rapat koordinasi antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes, pelatihan dari dinas terkait, hingga penandatanganan kerja sama dengan lembaga keuangan lokal. Sementara itu, interaksi informal terbangun melalui komunikasi personal antara aktor, saling berbagi informasi, hingga dukungan moral dari tokoh masyarakat yang tidak terekam secara administratif tetapi memiliki dampak besar terhadap kelancaran operasional.

Dalam konteks sosial, hubungan ini membentuk struktur jaringan yang bisa disebut semi terpusat (Pradhana et al., 2025). Pemerintah desa masih menjadi simpul utama dalam menghubungkan aktor-aktor lainnya, seperti kelompok tani, dan pihak eksternal. Namun demikian, ada kecenderungan bahwa beberapa relasi justru tumbuh secara horizontal, seperti kerja sama langsung antara kelompok tani dan pengelola BUMDes tanpa perantara aparat desa.

Pola hubungan yang terbentuk ini mencerminkan adanya ketergantungan antar aktor, sekaligus memperlihatkan potensi untuk membangun kolaborasi jangka panjang. Semakin kuat dan aktif komunikasi antar lembaga, maka semakin besar peluang bagi BUMDes untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola usaha serta mengakses sumber daya. Dalam hal ini, jejaring sosial bukan hanya menjadi saluran pertukaran informasi, tetapi juga mekanisme distribusi kepercayaan, legitimasi, dan sumber daya strategis.

Salah satu aspek penting dari jaringan sosial antar lembaga dalam konteks pembentukan dan pengembangan BUMDes adalah proses pertukaran sumber daya yang terjadi antar aktor. Di Desa Nanggerangjaya, pertukaran ini berlangsung dalam berbagai bentuk baik yang bersifat material maupun non-material (SUSANTI et al., 2017). Pemerintah desa misalnya, memberikan dukungan dalam bentuk regulasi, legitimasi formal, serta pengalokasian anggaran dari dana desa sebagai modal awal usaha. Sementara itu, kelompok tani serta pelaku usaha menyumbang dukungan berupa tenaga kerja, serta kepercayaan dalam menjalin kerjasama ekonomi berbasis lokal.

Lembaga eksternal seperti pendamping desa lembaga keuangan berperan menyediakan akses terhadap pengetahuan teknis, pelatihan manajemen usaha, serta pembiayaan mikro. Dalam kasus ini, tokoh masyarakat juga berkontribusi secara tidak langsung melalui pengaruh sosial dan penyebaran informasi kepada warga agar mendukung keberadaan dan program BUMDes. Salah satu narasumber dari tokoh masyarakat menjelaskan:

“Masyarakat tentunya sangat mendukung dalam proses pengembangan BUMDes itu sendiri, bahkan ikut serta dalam pengembangan yang dilakukan oleh BUMDes. Berhubung, BUMDes memfokuskan pada sektor peternakan yaitu ternak kambing, tentunya masyarakat juga ikut andil dalam prosesnya” (Tokoh Masyarakat, 23 Juni 2025).

Pertukaran Sumber daya ini bersifat timbal balik, meskipun tidak selalu dalam bentuk yang setara. Misalnya, pengelola BUMDes menerima bantuan modal atau pelatihan, lalu sebagai gantinya mereka menyediakan ruang usaha bagi produk masyarakat lokal atau memberi kontribusi bagi pembangunan desa. Pola ini menunjukkan bahwa hubungan dalam jaringan tidak semata didasarkan pada kekuasaan struktural, tetapi juga pada prinsip saling menguntungkan dan berbasis kepercayaan (*trust-based collaboration*) (Sumadi, 2016).

Dari perspektif teori jaringan sosial, pertukaran semacam ini menunjukkan pentingnya modal sosial dalam membangun relasi yang berkelanjutan. Sumber daya yang mengalir di dalam jaringan tidak hanya meningkatkan kapasitas institusional BUMDes, tetapi juga memperkuat kohesi sosial antar aktor lokal. Dengan demikian, semakin intensif pertukaran yang terjadi, maka semakin kuat pula jaringan yang terbentuk dalam menopang pertumbuhan BUMDes.

Meskipun jaringan sosial antar lembaga di Desa Nanggerangjaya cenderung membentuk pola kerja sama yang saling menguntungkan, dinamika yang muncul di dalamnya tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan BUMDes berasal dari ketimpangan relasi antar aktor, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi sebagai elemen masyarakat. Di sisi lain, terdapat persoalan mengenai kurangnya komunikasi antar lembaga yang bersifat teknis maupun sosial. Misalnya, belum semua kelompok mitra mendapatkan informasi secara merata mengenai program BUMDes atau kesempatan kerja sama, dikarenakan pada dasarnya BUMDes Desa Nanggerangjaya baru terbentuk.

Agar analisis lebih tajam dan relevan secara teoritis, penting untuk mengaitkan temuan empiris dengan pendekatan konseptual yang digunakan. Sebagai contoh, dalam perspektif

structural holes yang dikemukakan oleh Ronald Burt, aktor yang menempati posisi sebagai penghubung antara dua kelompok sosial atau institusi yang belum terhubung langsung, berpotensi memiliki keuntungan struktural. Dalam konteks ini, pengelola BUMDes yang mampu menjalin komunikasi dan kolaborasi secara aktif dengan kelompok tani dan lembaga pembiayaan dapat memainkan peran sebagai perantara strategis. Posisi ini memberikan akses terhadap informasi, peluang sumber daya, serta pengaruh sosial yang tidak dimiliki oleh aktor lain yang hanya beroperasi dalam satu lingkaran relasi. Oleh karena itu, pembacaan terhadap pola interaksi dalam jaringan sosial tidak hanya menunjukkan arah hubungan, tetapi juga mengungkap potensi kekuasaan dan mobilisasi sumber daya yang tersembunyi di dalamnya.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan dan pengembangan BUMDes di Desa Nanggerangjaya tidak dapat dilepaskan dari kekuatan relasi sosial antar lembaga di tingkat lokal. Keberadaan jaringan sosial yang mencakup aktor-aktor seperti pemerintah desa, pengelola BUMDes, kelompok tani, lembaga keuangan, serta tokoh masyarakat membentuk sistem kolaboratif yang mendukung terciptanya sinergi kelembagaan. Hubungan ini tidak hanya bersifat struktural, melainkan juga kultural melalui pertukaran informasi, dukungan moral, hingga akses terhadap sumber daya ekonomi dan teknis.

Temuan juga memperlihatkan bahwa aktor yang berada di posisi penghubung (*bridging actor*) memiliki peran kunci dalam memperluas jejaring dan meningkatkan kapasitas adaptif BUMDes. Interaksi yang terbangun, baik formal maupun informal, berkontribusi terhadap legitimasi sosial dan kepercayaan kolektif yang memperkuat fondasi kelembagaan. Namun demikian, beberapa tantangan tetap muncul, seperti kesenjangan informasi, keterbatasan SDM, dan minimnya partisipasi sebagian masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan BUMDes tidak hanya bergantung pada tata kelola internal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas dan intensitas relasi sosial yang terbentuk antar lembaga lokal. Pemetaan dan penguatan jaringan sosial menjadi strategi penting dalam menciptakan kelembagaan desa yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darma Saputra, F. D. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bumdes Dile dalam Pengelolaan Unit-Unit Usaha. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7), 3199. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3501>
- Hasyim, S., Rustiana, E., & Permana, H. (2021). *Masyarakat Di Desa Ciara Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung*. 6, 40–51.
- Iskandar, J., Engkus, Fadjar Tri Sakti, Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 1–11. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.1>
- Panjaitan, A. H., Wijoyo, A. E., Maulana, F., & Pahlevi, R. (2022). Optimalisasi Kebijakan Bumdes Kemedesa Pdt Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Polinter : Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 8(1), 1–31. <https://doi.org/10.52447/polinter.v8i1.6076>
- Pradhana, C., Sumartias, S., & Rahmat, A. (2025). *Strategi komunikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dalam mewujudkan " satu data perkebunan " The communication strategy*

- of Indonesia ' s Central Bureau of Statistics (BPS) in realizing the " one plantation data " initiative.* 8(1), 216–230. <https://doi.org/10.17977/um022v8i12025p216-230>
- Pranaya, A. A. (2023). Analisis Jaringan Sosial Terhadap Pembentukan Virtual Togetherness Melalui Tagar #Prayforbali. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 8(4), 643–655. <https://jurnalilmukomunikasi.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/108>
- Putri, N. A., Zetra, A., & Putera, R. E. (2021). Peran Dan Sinergitas Antar Aktor Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Governance. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(2), 174. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i2.32107>
- Ritzer, George dalam Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmoder, 2012. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soejono, D., Zahrosa, D. B., Maharani, A. D., Baihaqi, Y., & Amam, A. (2021). Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Lumajang. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 18(1), 26. <https://doi.org/10.20961/sepa.v18i1.44240>
- Sumadi, A. F. (2016). Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Law and Social Justice in Constitutional Law Perspective. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 853–854.
- SUSANTI, G., ALWI, A., & TAMBA, L. (2017). Resources Exchange Model in Implementation Network of Fishermen Community Policy in Makassar City. *Journal of Government and Politics*, 8(1). <https://doi.org/10.18196/jgp.8153>
- Darma Saputra, F. D. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bumdes Dile dalam Pengelolaan Unit-Unit Usaha. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7), 3199. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3501>
- Hasyim, S., Rustiana, E., & Permana, H. (2021). *Masyarakat Di Desa Ciara Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung*. 6, 40–51.
- Iskandar, J., Engkus, Fadjar Tri Sakti, Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 1–11. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.1>
- Panjaitan, A. H., Wijoyo, A. E., Maulana, F., & Pahlevi, R. (2022). Optimalisasi Kebijakan Bumdes Kemedesa Pdt Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Polinter : Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 8(1), 1–31. <https://doi.org/10.52447/polinter.v8i1.6076>
- Pradhana, C., Sumartias, S., & Rahmat, A. (2025). Strategi komunikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dalam mewujudkan " satu data perkebunan " The communication strategy of Indonesia ' s Central Bureau of Statistics (BPS) in realizing the " one plantation data " initiative. 8(1), 216–230. <https://doi.org/10.17977/um022v8i12025p216-230>
- Pranaya, A. A. (2023). Analisis Jaringan Sosial Terhadap Pembentukan Virtual Togetherness Melalui Tagar #Prayforbali. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 8(4), 643–655. <https://jurnalilmukomunikasi.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/108>
- Putri, N. A., Zetra, A., & Putera, R. E. (2021). Peran Dan Sinergitas Antar Aktor Badan

- Usaha Milik Desa (Bumdes) Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Governance. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(2), 174. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i2.32107>
- Soejono, D., Zahrosa, D. B., Maharani, A. D., Baihaqi, Y., & Amam, A. (2021). Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Lumajang. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 18(1), 26. <https://doi.org/10.20961/sepa.v18i1.44240>
- Sumadi, A. F. (2016). Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Law and Social Justice in Constitutional Law Perspective. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 853–854.
- SUSANTI, G., ALWI, A., & TAMBA, L. (2017). Resources Exchange Model in Implementation Network of Fishermen Community Policy in Makassar City. *Journal of Government and Politics*, 8(1). <https://doi.org/10.18196/jgp.8153>